

INDONESIAN ECONOMIC DIPLOMACY IN ATTRACTING FOREIGN INVESTMENT IN THE NUSANTARA NATIONAL CAPITAL PROJECT (IKN): ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY

Irfan Rahalus¹, Achmad²

irfanrahalus01@gmail.com¹, dottoromalam@gmail.com²

Universitas Fajar

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik investasi asing pada proyek Ibu Kota Nusantara (IKN) melalui perspektif Ekonomi Politik Internasional (EPI) dan teori Neorealisme Kenneth N. Waltz. Sebagai proyek strategis nasional, pembangunan IKN memerlukan pembiayaan besar yang tidak dapat sepenuhnya ditopang oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) menjadi komponen esensial. Dalam sistem internasional yang anarkis dan kompetitif, negara dipahami sebagai aktor rasional yang berupaya meningkatkan kapabilitas nasional melalui pemanfaatan sumber daya eksternal demi mengamankan kepentingan nasional. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi pustaka (library research), melalui analisis dokumen resmi pemerintah, laporan lembaga internasional, jurnal ilmiah, serta literatur terkait diplomasi ekonomi, FDI, dan kepentingan nasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dalam proyek IKN diwujudkan melalui promosi investasi, penguatan kerja sama bilateral dan multilateral, pemberian insentif fiskal, serta reformasi regulasi guna menciptakan iklim investasi yang kondusif. Strategi tersebut mencerminkan upaya negara dalam mengamankan modal, transfer teknologi, dan dukungan internasional untuk memperkuat pembangunan domestik. Keputusan investor asing dipengaruhi oleh stabilitas politik, kepastian hukum, kredibilitas kebijakan, prospek ekonomi jangka panjang, serta persepsi terhadap posisi strategis Indonesia dalam ekonomi global. Dalam kerangka Neorealisme, diplomasi ekonomi ini merupakan strategi self-help untuk meningkatkan kekuatan ekonomi nasional dan memperkuat posisi relatif Indonesia dalam sistem internasional.

Kata Kunci: Diplomasi Ekonomi, Investasi Asing Langsung (FDI), Ekonomi Politik Internasional, Neorealisme, Kepentingan Nasional.

ABSTRACT

This study examines Indonesia's economic diplomacy in attracting foreign direct investment (FDI) for the Nusantara National Capital (IKN) project through the lens of International Political Economy (IPE) and Kenneth N. Waltz's Neorealism. As a national strategic initiative, the development of IKN requires substantial financial resources beyond the capacity of the State Budget (APBN), positioning FDI as a critical financing instrument. Within an anarchic and competitive international system, the state is conceptualized as a rational actor seeking to enhance its capabilities by mobilizing external resources to secure national interests. This research employs a qualitative method with a library research approach, drawing on official government documents, international institutional reports, academic journals, and relevant literature on economic diplomacy and investment. The findings reveal that Indonesia's economic diplomacy for IKN is pursued through investment promotion, bilateral and multilateral engagement, fiscal incentives, and regulatory reforms designed to foster a conducive investment climate. These measures aim to secure capital inflows, technological transfer, and international legitimacy to support domestic development objectives. Investor decisions are influenced by political stability, legal certainty, policy credibility, long-term economic prospects, and Indonesia's strategic position in the global economy. From a Neorealist perspective, Indonesia's strategy reflects a self-help approach to

strengthening national economic power and improving its relative standing in the international system. Economic diplomacy thus operates not merely as cooperation, but as a strategic instrument for safeguarding national interests amid global competition.

Keywords: *Economic Diplomacy, Foreign Direct Investment (FDI), International Political Economy, Neorealism, National Interest.*

PENDAHULUAN

Pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur yang diwujudkan melalui pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan salah satu proyek strategis terbesar dalam sejarah pembangunan Indonesia modern. Seperti telah diketahui, pembangunan IKN telah mengalami fase-persiapan, pengesahan regulasi, perjanjian investasi asing, dan mulai masuk fase konstruksi infrastruktur. Misalnya, regulasi insentif untuk menarik investor asing telah diselesaikan oleh pemerintah pada Juli 2024.

Proyek ini bukan hanya bermakna administratif, tetapi juga mencerminkan visi pemerataan pembangunan, penguatan daya saing ekonomi, serta pengurangan ketimpangan antarwilayah. Dalam konteks tersebut, IKN diharapkan menjadi simbol transformasi Indonesia menuju negara maju yang berkelanjutan dan berorientasi pada inovasi. Namun, dengan estimasi kebutuhan pembiayaan mencapai lebih dari Rp 466 triliun, proyek ini menuntut sumber pendanaan yang tidak dapat hanya mengandalkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oleh karena itu, kehadiran investasi asing langsung (Foreign Direct Investment/FDI) menjadi kunci keberhasilan proyek ini.

Ketergantungan pada pembiayaan investasi asing menempatkan diplomasi ekonomi sebagai instrumen strategis pemerintah Indonesia. Diplomasi ekonomi dalam hal ini berfungsi untuk memperkuat daya tarik proyek IKN di mata investor global melalui promosi, negosiasi, dan kerja sama bilateral maupun multilateral. Pemerintah berupaya menciptakan narasi bahwa IKN bukan hanya proyek pembangunan kota baru, melainkan peluang ekonomi jangka panjang yang mampu meningkatkan efisiensi pemerintahan, menciptakan pusat inovasi, serta membuka ruang bagi kolaborasi global. Dengan demikian, diplomasi ekonomi Indonesia dalam konteks pembangunan IKN tidak hanya bersifat instrumental, tetapi juga merupakan bagian dari strategi mempertahankan dan memperluas kekuatan nasional di ranah ekonomi global.

Secara historis, diplomasi ekonomi Indonesia telah mengalami perkembangan yang signifikan, terutama sejak masa reformasi ekonomi dan integrasi ke dalam ekonomi global. Pemerintah Indonesia mulai menempatkan kerja sama ekonomi internasional sebagai salah satu prioritas utama kebijakan luar negeri. Dalam konteks pembangunan IKN, diplomasi ekonomi dijalankan melalui promosi investasi di berbagai forum internasional seperti G20, ASEAN, World Economic Forum, serta kunjungan bilateral ke negara-negara mitra utama. Melalui forum tersebut, Indonesia berupaya meyakinkan investor tentang stabilitas politik, prospek pertumbuhan ekonomi, dan komitmen terhadap prinsip keberlanjutan yang menjadi daya tarik IKN Nusantara.

Namun realisasi investasi asing dalam proyek IKN belum sepenuhnya sesuai dengan harapan. Data hingga tahun 2025 menunjukkan bahwa sebagian besar investor masih menunggu kepastian regulasi, jaminan infrastruktur, dan kejelasan model bisnis yang akan diterapkan. Kondisi ini menunjukkan adanya tantangan serius dalam diplomasi ekonomi Indonesia untuk membangun kepercayaan internasional terhadap proyek tersebut. Di sisi lain, negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia berhasil menarik FDI besar-besaran melalui strategi diplomasi ekonomi yang agresif dan konsisten. Perbandingan ini menunjukkan pentingnya diplomasi ekonomi yang terencana, terkoordinasi, dan berorientasi pada kepentingan nasional.

Dalam perspektif Ekonomi Politik Internasional (EPI), diplomasi ekonomi tidak hanya dilihat sebagai sarana meningkatkan investasi, tetapi juga sebagai bentuk politik kekuasaan ekonomi. Melalui diplomasi ekonomi, negara berusaha memperluas pengaruhnya dalam sistem internasional yang bersifat anarkis, sebagaimana dijelaskan oleh teori Neorealisme. Teori ini berargumen bahwa negara akan memanfaatkan setiap sumber daya, termasuk hubungan ekonomi, untuk memperkuat posisinya dalam kompetisi global. Dalam konteks pembangunan IKN, diplomasi ekonomi Indonesia dapat dipahami sebagai upaya memperkokoh kekuatan nasional dengan menarik dukungan ekonomi eksternal tanpa kehilangan kedaulatan ekonomi domestik.

Konsep Foreign Direct Investment (FDI) sangat relevan dalam memahami peran investor asing terhadap pembangunan IKN. FDI tidak hanya menyediakan modal, tetapi juga teknologi, inovasi, dan jejaring global yang dapat mempercepat pembangunan ekonomi lokal. Namun, keputusan investor asing untuk berinvestasi tidak semata-mata didasarkan pada potensi keuntungan ekonomi, melainkan juga pada faktor politik, stabilitas hukum, dan persepsi terhadap tata kelola pemerintahan. Dengan demikian, diplomasi ekonomi Indonesia harus mampu menjawab persoalan kepercayaan dan kepastian hukum yang menjadi perhatian utama investor.

Kepentingan nasional menjadi elemen utama yang melandasi strategi diplomasi ekonomi Indonesia. Pembangunan IKN merupakan bagian dari upaya strategis untuk memperkuat kohesi nasional, mendistribusikan pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan pusat pemerintahan yang efisien dan modern. Namun, di tengah persaingan global dalam menarik investasi, Indonesia dihadapkan pada dilema antara keterbukaan ekonomi dan perlindungan terhadap kepentingan nasional. Diplomasi ekonomi dalam konteks ini harus mampu menyeimbangkan dua kepentingan tersebut: menjaga kedaulatan ekonomi sekaligus membuka diri terhadap peluang investasi asing.

Faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investor asing untuk menanamkan modal di IKN cukup beragam, mulai dari faktor ekonomi makro seperti stabilitas nilai tukar, inflasi, dan kebijakan fiskal, hingga faktor non-ekonomi seperti persepsi korupsi, kualitas infrastruktur, serta birokrasi perizinan. Laporan Ease of Doing Business dan indeks persepsi korupsi kerap menjadi acuan investor dalam menilai kelayakan suatu negara untuk investasi. Oleh karena itu, diplomasi ekonomi Indonesia harus mampu mengkomunikasikan reformasi kebijakan domestik yang telah dilakukan, seperti penyederhanaan regulasi melalui Undang-Undang Cipta Kerja, sebagai bukti komitmen pemerintah dalam menciptakan iklim investasi yang sehat.

Selain itu, strategi promosi investasi yang dilakukan Indonesia perlu mempertimbangkan konteks global yang dinamis. Krisis ekonomi global, ketegangan geopolitik, dan transisi energi dunia turut memengaruhi arus investasi asing. Negara-negara maju kini lebih selektif dalam menyalurkan FDI, dengan menekankan prinsip keberlanjutan dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, proyek IKN Nusantara yang mengusung konsep “smart, green, and sustainable city” memiliki potensi besar untuk menarik investor yang berorientasi pada ekonomi hijau. Namun, potensi tersebut harus disertai dengan diplomasi ekonomi yang efektif untuk mengubah minat menjadi komitmen investasi nyata.

Penting pula dicatat bahwa diplomasi ekonomi bukan hanya tugas Kementerian Luar Negeri, tetapi memerlukan sinergi antara berbagai institusi, termasuk Kementerian Investasi/BKPM, Otorita IKN, dan pemerintah daerah. Kurangnya koordinasi antar lembaga dapat menciptakan inkonsistensi kebijakan yang berpotensi menurunkan kredibilitas diplomasi ekonomi Indonesia di mata dunia. Oleh karena itu, diperlukan integrasi kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi domestik agar pesan diplomasi yang disampaikan

konsisten dan meyakinkan bagi calon investor.

Dari sisi empiris, beberapa negara telah menunjukkan keberhasilan diplomasi ekonomi dalam menarik FDI untuk pembangunan infrastruktur strategis. Misalnya, Malaysia dengan proyek Putrajaya dan Korea Selatan dengan Songdo International Business District berhasil mengamankan dukungan investor asing melalui strategi diplomasi yang proaktif, insentif fiskal yang menarik, serta jaminan hukum yang kuat. Pengalaman tersebut dapat menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia dalam mengembangkan strategi diplomasi ekonomi yang lebih komprehensif untuk proyek IKN Nusantara. Mengingat, sebagaimana telah diketahui, proyek IKN menyediakan kasus empiris menarik—karena berinteraksi dengan aktor global (investor asing, lembaga internasional), serta konteks diplomasi negara. Misalnya, kerja sama antara Nusantara Capital Authority (NCA) dan Indonesia Investment Authority (INA) menunjukkan bagaimana institusi negara mengajak investor global.

Selain aspek ekonomi dan politik, faktor sosial dan lingkungan juga menjadi pertimbangan penting dalam menarik FDI. Investor global kini lebih memperhatikan komitmen pemerintah terhadap isu-isu keberlanjutan, hak masyarakat lokal, dan tata kelola lingkungan. Dalam konteks IKN, Indonesia harus menunjukkan bahwa pembangunan kota baru tersebut tidak hanya ramah lingkungan, tetapi juga memperhatikan kesejahteraan sosial masyarakat sekitar. Diplomasi ekonomi Indonesia harus mampu mengartikulasikan nilai-nilai keberlanjutan ini sebagai daya tarik tambahan bagi investor asing.

Penelitian-penelitian terdahulu menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi memainkan peran signifikan dalam meningkatkan arus FDI ke negara-negara berkembang. Studi oleh Bayne dan Woolcock (2017) menegaskan bahwa efektivitas diplomasi ekonomi sangat bergantung pada kemampuan negara dalam mengintegrasikan kebijakan luar negeri dan kebijakan ekonomi domestik. Dengan demikian, penelitian ini menjadi penting untuk menganalisis bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia diimplementasikan secara konkret dalam konteks pembangunan IKN, serta sejauh mana faktor-faktor eksternal dan internal memengaruhi keputusan investor asing.

Kerangka berpikir penelitian ini berangkat dari asumsi teori Neorealisme, bahwa negara bertindak rasional untuk mempertahankan dan memperluas kekuatan nasional. Melalui diplomasi ekonomi, Indonesia berupaya memperkuat kapasitas nasionalnya dengan menarik modal, teknologi, dan dukungan internasional. Namun, karena sistem internasional bersifat kompetitif, diplomasi ekonomi Indonesia juga harus mampu menavigasi kepentingan negara lain yang mungkin memiliki agenda tersendiri dalam kerja sama investasi. Di sinilah relevansi pendekatan Neorealisme dalam memahami dinamika hubungan ekonomi-politik antara Indonesia dan investor asing dalam proyek IKN.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas persoalan tersebut, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini tidak hanya akan menjelaskan bagaimana strategi diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik investasi asing untuk pembangunan IKN Nusantara, tetapi juga mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keputusan investor.

Berangkat dari situasi yang telah di tengahkan di atas. Maka, dalam penelitian yang diproyeksikan ini penulis mengambil judul penelitian, yakni “Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Menarik Investasi Asing pada Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara: Analisis dalam Perspektif Ekonomi Politik Internasional”.

KERANGKA ANALISIS

Neorealisme sebagai pengembangan dari teori realisme menekankan bahwa struktur sistem internasional bersifat anarkis, yaitu tidak adanya otoritas tertinggi yang mengatur hubungan antarnegara. Dalam kondisi tersebut, negara diposisikan sebagai aktor utama dalam hubungan internasional yang bertindak rasional untuk mempertahankan kelangsungan hidup serta menjamin kepentingan nasionalnya. Menurut Kenneth Waltz dalam *Theory of International Politics*, struktur internasional ditentukan oleh distribusi kapabilitas di antara negara-negara, sehingga setiap negara berada dalam situasi self-help dan harus mengandalkan kemampuannya sendiri. Oleh karena itu, negara akan berupaya meningkatkan kekuatan relatifnya dalam sistem internasional, termasuk melalui kerja sama yang tetap mempertimbangkan keuntungan relatif (relative gains) dibandingkan negara lain.

Diplomasi ekonomi dipahami sebagai salah satu instrumen kebijakan luar negeri yang digunakan negara untuk mencapai kepentingan ekonomi nasional. Diplomasi ekonomi bertujuan meningkatkan perdagangan, investasi, dan kerja sama ekonomi melalui promosi investasi, negosiasi kerja sama, pemberian insentif, serta pembentukan perjanjian bilateral maupun multilateral. Dalam konteks pembangunan nasional, diplomasi ekonomi menjadi instrumen penting untuk menarik investasi asing guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur, sekaligus menciptakan iklim investasi yang kondusif serta meningkatkan kepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan politik nasional. Dengan demikian, diplomasi ekonomi tidak hanya berfungsi sebagai alat hubungan luar negeri, tetapi juga sebagai strategi untuk memperkuat kapasitas ekonomi negara.

Salah satu bentuk konkret dari upaya tersebut adalah Foreign Direct Investment (FDI), yaitu investasi yang dilakukan oleh individu atau perusahaan dari suatu negara ke negara lain dengan tujuan memperoleh kepemilikan atau kontrol jangka panjang atas aset produktif. FDI berbeda dengan investasi portofolio karena melibatkan keterlibatan langsung dalam pengelolaan usaha, serta memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, transfer teknologi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan kapasitas produksi nasional. Oleh karena itu, banyak negara berkembang berupaya menarik FDI sebagai sumber pembiayaan pembangunan. Dalam proyek pembangunan Ibu Kota Nusantara, FDI menjadi salah satu sumber pendanaan yang diharapkan dapat mempercepat pembangunan infrastruktur dan mendukung transformasi ekonomi nasional.

Berdasarkan integrasi ketiga konsep tersebut, diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik FDI pada proyek Ibu Kota Nusantara dapat dipahami sebagai strategi negara dalam sistem internasional yang anarkis untuk meningkatkan kapabilitas dan kekuatan relatifnya. Dalam perspektif neorealisme, upaya menarik investasi asing bukan sekadar kebijakan pembangunan domestik, melainkan bagian dari strategi self-help untuk memperkuat posisi Indonesia dalam struktur kekuatan internasional yang kompetitif. Kerangka analisis ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana diplomasi ekonomi Indonesia dijalankan sebagai instrumen pencapaian kepentingan nasional melalui penguatan kapasitas ekonomi dalam sistem internasional.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan paradigma Ekonomi Politik Internasional (EPI) dan rancangan studi kasus pada diplomasi ekonomi Indonesia dalam proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara strategi diplomasi ekonomi dan arus investasi asing.

Penelitian bersifat kepustakaan (library research) dengan memanfaatkan sumber

sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, publikasi pemerintah, serta dokumen resmi terkait IKN. Sumber dipilih berdasarkan relevansi, kredibilitas, dan kemutakhiran.

Analisis data dilakukan melalui reduksi, kategorisasi tematik, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dengan mengaitkan teori Neorealisme dan konsep diplomasi ekonomi terhadap dinamika investasi asing pada proyek IKN. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber guna memastikan konsistensi dan keabsahan informasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Proyek Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara

Pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara merupakan manifestasi kebijakan strategis yang menegaskan peran negara dalam menentukan arah pembangunan nasional secara terpusat dan terencana. Proyek ini tidak hanya dipahami sebagai pemindahan lokasi pemerintahan dari Jakarta ke Kalimantan Timur, tetapi juga sebagai langkah transformasi struktural dalam pengelolaan ruang ekonomi dan politik nasional. IKN dirancang sebagai pusat pemerintahan baru yang merepresentasikan visi Indonesia menuju negara maju, modern, serta berdaya saing global. Dalam perspektif Neorealisme Kenneth N. Waltz, kebijakan pemindahan ibu kota ini dapat dilihat sebagai respon rasional negara terhadap tekanan sistem internasional yang kompetitif dan anarkis. Negara dalam sistem internasional tidak dapat bergantung pada aktor lain, sehingga pembangunan IKN menjadi bentuk upaya memperkuat kapasitas internal demi menjamin survival dan stabilitas nasional

IKN Nusantara telah ditetapkan sebagai Proyek Strategis Nasional (PSN), yang menunjukkan bahwa negara menempatkan pembangunan ini sebagai prioritas utama dalam agenda jangka Panjang. Status PSN menegaskan bahwa pembangunan ibu kota baru bukan proyek biasa, melainkan program besar yang melibatkan mobilisasi sumber daya ekonomi, politik, dan institusional secara masif. Dalam perspektif Neorealisme, kontrol atas wilayah dan kemampuan mengelola ruang strategis merupakan elemen penting dalam mempertahankan kekuatan negara. Dengan demikian, pembangunan IKN memiliki implikasi langsung terhadap kepentingan nasional Indonesia dalam menjaga integrasi wilayah sekaligus memperkuat kapasitas geopolitik nasional

B. Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Menarik Investasi Asing pada Proyek IKN

Kebutuhan pembiayaan proyek IKN yang sangat besar menempatkan diplomasi ekonomi sebagai instrumen strategis negara. Diplomasi ekonomi dijalankan untuk mengamankan sumber daya eksternal berupa modal, teknologi, serta dukungan internasional guna mempercepat pembangunan. Dalam konteks ini, diplomasi ekonomi tidak sekadar promosi investasi, tetapi merupakan strategi kebijakan luar negeri yang diarahkan untuk memperkuat kepentingan nasional melalui akses terhadap kapital global.

Dalam kerangka Neorealisme tindakan tersebut mencerminkan perilaku negara sebagai aktor rasional yang berupaya meningkatkan power dalam sistem internasional yang kompetitif. Pembangunan nasional menjadi bagian dari kompetisi ekonomi global, di mana negara-negara berlomba membangun pusat pertumbuhan baru guna meningkatkan posisi relatifnya. Upaya Indonesia menjadikan IKN sebagai pusat ekonomi modern dan berkelanjutan menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi digunakan sebagai sarana untuk memperkuat kapabilitas nasional sekaligus meningkatkan daya tawar dalam struktur internasional.

Namun demikian efektivitas diplomasi ekonomi sangat bergantung pada stabilitas politik, kepastian hukum, dan kredibilitas kebijakan domestik. Kepercayaan investor menjadi faktor kunci dalam menentukan keberhasilan strategi ini. Dengan demikian,

diplomasi ekonomi dalam proyek IKN berfungsi sebagai jembatan antara kepentingan domestik dan dinamika ekonomi global.

C. Investasi Asing Langsung (FDI) sebagai Kepentingan Strategis Negara

Investasi Asing Langsung (Foreign Direct Investment/FDI) dalam pembangunan IKN diposisikan sebagai instrumen strategis untuk memperkuat kapasitas ekonomi nasional. FDI tidak hanya menyediakan pembiayaan eksternal, tetapi juga membawa potensi transfer teknologi, peningkatan kapasitas industri, serta integrasi ke dalam jaringan produksi global. Dalam konteks proyek IKN yang berskala besar dan kompleks, keberadaan FDI menjadi faktor krusial dalam mempercepat pembangunan infrastruktur dan kawasan ekonomi baru.

Dalam perspektif Neorealisme, FDI dapat dipahami sebagai bagian dari strategi negara dalam meningkatkan power ekonomi sebagai elemen utama kekuatan nasional. Negara bertindak rasional dengan mencari sumber daya eksternal untuk memperkuat posisi relatifnya dalam sistem internasional. Namun, keterlibatan investor asing juga harus dikelola secara hati-hati agar tidak menciptakan ketergantungan struktural yang berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi.

Hal ini menunjukkan bahwa FDI dalam proyek IKN bukan sekadar fenomena ekonomi, melainkan bagian dari dinamika Ekonomi Politik Internasional yang mencerminkan interaksi antara kepentingan nasional dan kapital global. Pengelolaan investasi asing menjadi ujian bagi negara dalam menyeimbangkan kebutuhan pembangunan dengan perlindungan terhadap kepentingan strategis jangka panjang.

D. Analisis Diplomasi Ekonomi Indonesia dalam Perspektif Neorealisme

Neorealisme memandang sistem internasional sebagai struktur anarkis yang mendorong negara untuk mengandalkan strategi self-help dalam mempertahankan eksistensi dan kepentingannya. Dalam konteks pembangunan IKN, Indonesia menghadapi kebutuhan besar akan modal dan teknologi yang tidak sepenuhnya dapat dipenuhi dari sumber daya domestik. Diplomasi ekonomi kemudian menjadi instrumen untuk memperoleh akses terhadap sumber daya tersebut dalam lingkungan internasional yang kompetitif.

Analisis menunjukkan bahwa pembangunan IKN merupakan bagian dari strategi peningkatan posisi relatif Indonesia dalam kompetisi ekonomi global, khususnya di kawasan Asia. Negara-negara berlomba membangun pusat ekonomi baru guna meningkatkan daya saing dan reputasi internasional. Dalam kerangka ini, IKN tidak hanya dimaknai sebagai proyek domestik, tetapi sebagai simbol modernisasi dan instrumen peningkatan power ekonomi nasional.

Dengan demikian, diplomasi ekonomi Indonesia dalam proyek IKN mencerminkan kalkulasi rasional negara untuk memperkuat kapabilitas nasional melalui akumulasi sumber daya ekonomi. Implikasi strategisnya terletak pada penguatan fondasi ekonomi, peningkatan daya saing global, serta konsolidasi posisi Indonesia dalam struktur internasional yang kompetitif.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia dalam menarik investasi asing untuk pembangunan IKN Nusantara merupakan strategi negara yang bersifat struktural dan berorientasi pada kepentingan nasional. Diplomasi ekonomi tidak sekadar dimaknai sebagai promosi investasi, tetapi sebagai instrumen kebijakan luar negeri untuk memperkuat kapasitas domestik melalui akses terhadap modal global. Dalam konteks ini, pembangunan IKN diposisikan sebagai bagian dari upaya meningkatkan power ekonomi nasional di tengah sistem internasional yang kompetitif.

Mengacu pada teori Neorealisme Kenneth Waltz strategi tersebut mencerminkan perilaku negara sebagai aktor rasional yang beroperasi dalam sistem internasional anarkis dan mengandalkan mekanisme self-help. Indonesia memanfaatkan diplomasi ekonomi untuk memperkuat posisi relatifnya dalam struktur ekonomi global, sekaligus mengelola keterlibatan investasi asing agar tetap berada dalam kerangka kepentingan nasional. Dengan demikian, diplomasi ekonomi dalam proyek IKN merupakan bagian dari strategi peningkatan kapabilitas nasional, bukan sekadar kebijakan administratif.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa faktor stabilitas politik, kepastian hukum, dan persepsi terhadap posisi strategis Indonesia dalam kompetisi global menjadi determinan utama dalam menarik investasi asing. Hal ini menegaskan bahwa keberhasilan diplomasi ekonomi tidak hanya ditentukan oleh strategi eksternal, tetapi juga oleh kapasitas internal negara dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas kebijakan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, pemerintah Indonesia perlu memperkuat diplomasi ekonomi secara lebih terarah dengan menempatkan pembangunan IKN Nusantara sebagai proyek strategis yang berorientasi pada kepentingan nasional jangka panjang. Penguatan diplomasi ekonomi tidak cukup dilakukan melalui promosi investasi semata, tetapi juga harus disertai peningkatan posisi tawar negara dalam setiap kerja sama yang dibangun. Dalam kerangka tersebut, keterlibatan investor asing perlu dikelola secara selektif dan terkendali agar tidak menimbulkan ketergantungan struktural yang berpotensi melemahkan kedaulatan ekonomi nasional.

Di sisi lain, guna memperdalam pemahaman akademik mengenai dinamika investasi asing pada proyek strategis nasional, penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan analisis empiris yang lebih spesifik terkait negara investor utama, pola negosiasi ekonomi-politik, serta pengaruh persaingan kekuatan global terhadap arus investasi. Pendekatan Ekonomi Politik Internasional dapat digunakan untuk memperkaya analisis mengenai interaksi antara kepentingan negara, aktor ekonomi, dan struktur sistem internasional. Dengan penguatan basis empiris tersebut, kajian lanjutan diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis yang lebih mendalam terhadap studi diplomasi ekonomi Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Aprianti, Y., Gani, I., & Ningtias, N. (2023). Penyuluhan investasi hijau dalam mendukung Ibu Kota Negara Nusantara. *Jurnal Dikemas (Pengabdian Kepada Masyarakat)*, 7(1), 53–59.
- Astuti, W. R. D., & Fathun, L. M. (2020). Diplomasi ekonomi Indonesia di dalam rezim ekonomi G20 pada masa pemerintahan Joko Widodo. *Intermestic: Journal of International Studies*, 5(1), 47–62. <https://doi.org/10.24198/intermestic.v5n1.4>
- Bayne, N., & Woolcock, S. (2017). *The new economic diplomacy: Decision-making and negotiation in international economic relations* (4th ed.). Routledge.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Gilpin, R. (2001). *Global political economy: Understanding the international economic order*. Princeton University Press.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022). *Skema pembiayaan pembangunan IKN Nusantara*. Kementerian Keuangan RI.
- Kementerian PPN/Bappenas. (2021). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024*. Bappenas.
- Keohane, R. O., & Nye, J. S. (1977). *Power and interdependence: World politics in transition*. Little, Brown.
- Maharani, A. S. A. (2024, July 31). *Pembangunan IKN butuh anggaran Rp 466 triliun*. Kompas.com. <https://ikn.kompas.com>

- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi penelitian kualitatif (Edisi revisi)*. Remaja Rosdakarya.
- Morgenthau, H. J. (2006). *Politics among nations: The struggle for power and peace (7th ed.)*. McGraw-Hill.
- Otorita Ibu Kota Nusantara. (2023). *Masterplan IKN Nusantara dan strategi investasi*. OIKN.
- Saner, R., & Yiu, L. (2001). *International economic diplomacy: Mutations in postmodern times*. Netherlands Institute of International Relations "Clingendael".
- Sari, D. P., & Nugroho, R. (2023). Foreign investment prospects in Indonesia's new capital city project. *Indonesian Journal of International Relations*, 7(1), 45–66.
- Setiawan, A., Meidiana, D., & Syakban, M. (2024). Analisis kerja sama internasional dalam membangun IKN. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 8(1), 1–14.
- UNCTAD. (2023). *World investment report 2023: Investing in sustainable energy for all*. United Nations.
- Waltz, K. N. (1979). *Theory of international politics*. Addison-Wesley.
- Waltz, K. N. (1993). The emerging structure of international politics. *International Security*, 18(2), 44–79.
- Waltz, K. N. (2000). Structural realism after the Cold War. *International Security*, 25(1), 5–41.
- Wicaksana, I. G. W. (2020). *Kebijakan luar negeri Indonesia: Politik domestik dan tatanan kawasan*. Airlangga University Press.
- Zaza, A. M. S. U., Banoet, R. Y., & Dima, E. T. Y. (2025). Dampak ketegangan geopolitik terhadap investasi asing langsung (FDI) di Indonesia. *Scientific Journal of Reflection: Economic, Accounting, Management and Business*, 8(3), 949–958. <https://doi.org/10.37481/sjr.v8i3.1175>.